

**EFEKTIVITAS PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



O L E H
PUTRI NAFISA
NPM 2022376

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI
TAHUN 2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : Putri Nafisa

NPM : 2022376

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing 1



Drs. H. Arpandi, M.AP
NUPTK. 8553741642130083

Pembimbing 2



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NUPTK. 2436770671130263

Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 199211004201509021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

Dalam kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Reno Affrian, S.Sos, M. AP. CIQar., CIQnR selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., MA selaku Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Drs. H. Arpandi, M.AP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
4. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
5. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, yang memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
6. Dan Seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselenggaranya skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman maupun materi yang didapat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya pendapat, saran-saran serta bimbingan dan pengarahan yang akan diterima oleh penulis.

Amuntai, Oktober 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Efektivitas	13
a. Pengertian Efektivitas	13
b. Teori Efektivitas	15
c. Kriteria Efektivitas	17
d. Pendekatan Efektivitas	21
2. Identitas Kependudukan Digital	24
a. Pengertian Identitas Kependudukan Digital (IKD).....	24
b. Manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD)	25
c. Fungsi utama Identitas Kependudukan Digital (IKD)	26

d. Urgensi Identitas Kependudukan Digital (IKD).....	26
e. Persyaratan dan Tahapan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).....	28
C. Kerangka Pemikiran.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Tipe Penelitian.....	34
D. Data dan Sumber Data	34
D. Desain Operasional Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisa Data	41
G. Uji Kredibilitas Data.....	42

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....33

Tabel 3. 2 Desain Operasional Variabel 35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	29
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu agenda penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Transformasi pelayanan publik menuju era digital memiliki relevansi yang krusial dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Dalam era *Good Governance*, prinsip keterbukaan, partisipasi publik, akuntabilitas dan responsivitas pemerintah menjadi landasan yang tak tergantikan dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks transformasi pelayanan publik, prinsip-prinsip ini mengarahkan pemerintah untuk membuka pintu kepada partisipasi masyarakat, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan efektif.

Salah satu wujud nyata dari transformasi digital dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini diluncurkan berdasarkan kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital yang menjadi dasar hukum regulasinya.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai, menampilkan data pribadi sebagai identitas

resmi penduduk. Kehadiran Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada KTP-el fisik, menekan biaya pengadaan blangko, serta meningkatkan keamanan data pribadi masyarakat. Identitas Kependudukan Digital memiliki tujuan untuk menyesuaikan penerapan teknologi informasi dalam bidang administrasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi oleh masyarakat, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik maupun privat, serta menjamin keamanan kepemilikan identitas melalui sistem autentikasi yang mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Identitas Kependudukan Digital ditujukan untuk setiap penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik sehingga berhak untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan syarat memiliki gawai pintar (*smartphone*) serta telah melakukan perekaman KTP-el. Proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi dengan mengisi data pribadi (NIK, email, nomor ponsel), dilanjutkan dengan verifikasi biometrik (swafoto bergerak, sidik jari, atau iris mata). Setelah itu, data diverifikasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil. Jika disetujui, penduduk akan menerima *personal identification number* untuk mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada perangkatnya.

Layanan yang dapat dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya sebatas KTP-el digital, tetapi juga mencakup dokumen kependudukan lain seperti kartu keluarga, biodata penduduk, akta pencatatan sipil, serta surat keterangan kependudukan. Selain itu, Identitas Kependudukan

Digital (IKD) juga memuat data balikan dari pengguna layanan publik maupun privat yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga penduduk dapat mengakses layanan administrasi secara lebih cepat, terintegrasi, dan aman langsung melalui aplikasi.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data agregat kependudukan semester I tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat sebanyak 238.435 jiwa, yang terdiri dari 119.504 jiwa laki-laki dan 118.931 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 10 kecamatan, 214 desa, dan 5 kelurahan, dengan konsentrasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 52.441 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Paminggir dengan 8.495 jiwa. *(Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester 1 tahun 2025)*

Jumlah penduduk yang termasuk kategori wajib KTP tercatat sebanyak 176.686 jiwa, yang terdiri dari 87.411 laki-laki dan 89.275 perempuan. Meskipun demikian, capaian jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga semester I tahun 2025 per tanggal 27 Oktober 2025 baru mencapai 7.632 orang atau 4,42% dari total penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 30% pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga menunjukkan bahwa penerapan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih belum

merata di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (*Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester 1 tahun 2025*)

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, per tanggal 27 Oktober 2025 tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bervariasi di setiap kecamatan. Persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah, yaitu sebesar 6,54% atau sebanyak 2.488 pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari 38.048 penduduk yang terekam. Hal ini dapat disebabkan karena wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga akses terhadap program Identitas Kependudukan Digital (IKD) lebih mudah dijangkau masyarakat. Posisi berikutnya ditempati oleh Kecamatan Amuntai Selatan dengan 5,53% pengguna Identitas Kependudukan Digital (1.286 orang dari 23.254 penduduk), serta Kecamatan Sungai Pandan dengan 4,68% pengguna Identitas Kependudukan Digital (994 orang). Sementara itu, beberapa wilayah lain masih menunjukkan capaian aktivasi yang relatif rendah. Kecamatan Amuntai Utara hanya mencapai 4,05% (645 pengguna), Banjarang sebesar 3,53% (492 pengguna), Haur Gading sebesar 3,68% (466 pengguna), dan Sungai Tabukan sebesar 3,20% (358 pengguna). Tingkat aktivasi terendah tercatat di Kecamatan Danau Panggang dengan 2,12% (330 pengguna), serta Kecamatan Paminggir yang baru mencapai 2,29% (358 pengguna). Rendahnya capaian di wilayah tersebut diduga disebabkan oleh faktor geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan jaringan internet, serta masih minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis

kepada masyarakat. (Sumber : *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester 1 tahun 2025*)

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat. Secara nasional, Identitas Kependudukan Digital (IKD) ditargetkan menjadi solusi untuk mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan efisien. Namun di tingkat daerah khususnya Hulu Sungai Utara, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi regulasi, teknis maupun sosial.

Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan fenomena yang menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum merata.

Pelaksanaan kegiatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum berjalan secara merata dan belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kondisi ini berarti dinas kependudukan dan pencatatan sipil belum mampu menerapkan program secara maksimal karena pelaksanaan penerapan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih terfokus pada wilayah perkotaan, sementara itu pelaksanaan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum menjangkau daerah pedesaan dan wilayah yang jauh dari pusat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan demikian, hal ini dapat mempengaruhi

penerapan program dan keberhasilan dari suatu program. (*Sumber : Laporan SPPD Bidang PIAK Disdukcapil HSU, 2025*).

2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat yang digunakan saat melakukan kegiatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terkadang terdapat gangguan teknis dan koneksi yang tidak stabil serta proses aktivasi belum bisa dilakukan secara mandiri.

Proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital masih bergantung pada petugas Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau melalui layanan jemput bola sehingga belum dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi alasan mengapa target capaian program menjadi rendah yaitu hanya sebesar 4,43% yang mana jauh dari target nasional sebesar 30%. Selain itu, pada saat kegiatan jemput bola maupun inovasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (INSTAL) terkadang jaringan SIAK Terpusat mengalami kendala seperti gangguan teknis pada sistem pusat serta koneksi internet yang tidak stabil, hal ini mengakibatkan proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi terhambat sehingga jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital menjadi terpengaruh dan tidak memenuhi target yang diinginkan. (*Sumber : Observasi awal penelitian, 2025*).

3. Terbatasnya fungsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam memuat informasi kependudukan masyarakat.

Identitas Kependudukan Digital hanya menampilkan dokumen kependudukan masyarakat yang dikeluarkan oleh SIAK Terpusat dan telah

divalidasi dengan Tanda Tangan Elektronik oleh pejabat berwenang. Jika dokumen kependudukan masyarakat belum divalidasi dan dikeluarkan oleh SIAK Terpusat, maka dokumen kependudukan tersebut tidak akan ditampilkan dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal ini menyebabkan kurangnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas aplikasi karena minimnya fitur yang tersedia. (*Sumber : Observasi awal penelitian, 2025*).

4. Sosialisasi penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum merata.

Kegiatan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) lebih banyak diarahkan ke instansi – instansi, sementara itu kepada masyarakat umum belum secara luas dan hanya dilakukan secara tidak langsung melalui program jemput bola. Kondisi ini berarti dinas kependudukan dan pencatatan sipil belum cukup transparan dalam menyampaikan informasi terkait manfaat, fungsi, dan mekanisme penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Akibatnya, sebagian besar masyarakat belum mengetahui itu serta banyak masyarakat belum beralih dari penggunaan KTP-el Fisik ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). (*Sumber : Laporan SPPD Bidang PIAK Disdukcapil HSU, 2025*).

Berdasarkan permasalahan di atas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengambil judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memperjelas permasalahan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas, penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sesuai dengan teori menurut Campbell J.P dalam Sawir (2020:127). Teori ini mencakup beberapa indikator terkait efektivitas yaitu:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan yang ada dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan identitas kependudukan digital (IKD) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan identitas kependudukan digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti di prodi Administrasi Publik di bidang kebijakan publik, serta dapat memberikan sumbangan informasi yang berarti bagi peneliti lainnya terutama berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan gambaran nyata mengenai sejauh mana penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) berjalan efektif, sehingga digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan dan pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat serta prosedur aktivasi

IKD, sehingga dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung transformasi digital.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Andi Reski Apriani (2022) dalam skripsinya yang berjudul **“Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar”** Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Benteng dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Benteng belum berjalan efektif, karena masih terdapat kendala dalam pencapaian target nasional penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun 2021. Meskipun demikian, beberapa aspek seperti prosedur pelaksanaan, sosialisasi kepada masyarakat, serta komunikasi lintas organisasi telah berjalan cukup baik. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985) yang menilai efektivitas berdasarkan tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pencapaian tujuan belum sepenuhnya tercapai, integrasi antar pihak pelaksana sudah cukup baik, sedangkan adaptasi dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana masih terbatas. Penelitian ini memberikan

kontribusi penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah.

2. Indri Apriani Nur (2023) dalam skripsinya yang berjudul **“Efektivitas Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar”** Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembuatan KTP Digital berbasis aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta validasi data dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi IKD di Kota Makassar sudah berjalan efektif, terlihat dari peningkatan signifikan jumlah pengguna sejak awal penerapan pada tahun 2021 sebanyak 420 jiwa, meningkat menjadi 15.000 jiwa pada pertengahan tahun 2023, dan mencapai 50.000 jiwa pada akhir tahun 2023. Program ini mempermudah masyarakat karena proses pembuatan KTP Digital dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi yang tersedia di *Playstore*, tanpa perlu antri di kantor Disdukcapil. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi dan minimnya sosialisasi dari pihak Dinas, sehingga belum semua warga mengetahui cara menggunakan aplikasi IKD.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban (Anggrayni & Yusliati, 2018:13).

Menurut Sawir (2020:125), konsep efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Dalam Hidayat dkk (2024:8) mengatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan suatu tindakan, kegiatan atau proses. Ini mengacu pada sejauh mana suatu upaya atau usaha mencapai hasil yang diharapkan atau ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mahmudi dalam Hertati (2020:22) “Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.”

Menurut Handoko dalam Mutiarin dan Zaenudin (2021:96) “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”

Menurut Supriyono dalam Dedi Amrizal, dkk (2018:40-41) “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”

Menurut Komaruddin dalam Mutiarin dan Zaenudin (2014:96) “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Menurut Mardiasmo dalam Siregar, dkk, (2023:18) “Efektivitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa berhasil atau tidak suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, organisasi tersebut dianggap berjalan dengan efektif. Mengevaluasi seberapa baik hubungan antara target penerimaan pajak dan hasil pungutan pajak itu sendiri dikenal dengan efektivitas.”

Menurut Mahmudi dalam Siahaan dan Pardede (2022:90), “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.”

Menurut Hidayat dalam Angrayni dan Yusliati (2018:13) “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.”

Menurut Harbani Pasolong dalam Zohriah (2023:90) “Efektivitas berasal dari kata efek dan menggunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas memiliki arti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tecapai sesuai dengan yang

diharapkan atau dengan kata lain sasaran tercapai dengan adanya proses kegiatan tersebut.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Sedangkan efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.”

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sejauh mana perencanaan, proses, dan hasil yang dicapai dapat memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

b. Teori Efektivitas

Menurut Campbell J.P dalam Sawir (2020:127) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1) Keberhasilan Program

Dilihat dari pengetahuan terhadap program dan penerapan program yang dilakukan sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditentukan.

2) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran program harus mempertimbangkan target yang diharapkan dari suatu program serta mekanisme atau tahapan pengoperasian program.

3) Kepuasan Terhadap Program

Semakin berkualitas suatu program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima program semakin tinggi, dan dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal pemerintah.

4) Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengelolaan program serta bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dilihat dari sejauh mana bentuk transparansi yang dilakukan dalam penerapan program serta penilaian tentang program tersebut.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey yang dikutip Sudarwan Danim dalam Mudiana, dkk (2024:15) menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dankemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, di mana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Menurut Budiani dalam Farhani dan Adnan (2021:71-73)

Efektivitas program dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel berikut:

- 1) Ketepatan Sasaran Program
Merupakan ukuran efektivitas dengan melihat apakah program sudah sesuai tujuan dan tepat ditujukan kepada pihak yang menjadi sasaran utama.
- 2) Sosialisasi Program
Adalah proses penyampaian informasi agar masyarakat mengetahui, memahami, dan dapat memanfaatkan program.
- 3) Tujuan Program
Merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai suatu program agar pelaksanaannya terukur dan sesuai misi yang ditetapkan.
- 4) Pemantauan Program
Adalah upaya memeriksa dan mengevaluasi jalannya program untuk memastikan sesuai tujuan serta memperbaiki jika terjadi kendala.

Menurut pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam Mudiana, dkk (2024:17-18) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1) Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian - bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (b) sasaran merupakan target yang kongkrit, (c) dasar hukum.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) prosedur (b) proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan - perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) peningkatan kemampuan, dan (b) sarana dan prasarana.

c. Kriteria Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya merupakan salah satu kriteria penting dalam ilmu administrasi yang menekankan pada ketepatan antara harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Efektivitas tidak hanya diukur dari minimnya kesalahan, tetapi juga dari kemampuan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, memanfaatkan pengalaman masa lalu, serta mengimplementasikan pemikiran rasional ke dalam tindakan nyata. Dengan demikian, efektivitas menjadi landasan utama bagi individu, kelompok, maupun organisasi dalam mencapai tujuan

secara optimal, serta selalu berkaitan erat dengan rasionalitas dan efisiensi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kriteria efektivitas menurut Makmur (2015:7-9) yang terdiri dari beberapa unsur-unsurnya antara lain:

1) Ketepatan penentuan waktu

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Janganlah kita menyalahgunakan waktu karena apabila kita tidak menggunakan dengan tepat berarti kita akan mengalami kerugian karena waktu yang berlalu itu tidak akan kembali dan pergi selamanya.

2) Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3) Ketepatan dalam pengukuran

Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektifitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

4) Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektifan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah

suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur, atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5) Ketepatan berpikir

Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran Descartes yang mengungkapkan *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6) Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

7) Ketepatan dalam menentukan tujuan

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8) Ketepatan ketepatan sasaran

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Adapun menurut Gibson dalam Mutiarin & Zaenudin

(2014:16) bahwa kriteria efektivitas, yaitu :

- 1) Kriteria jangka pendek-produktivitas
- 2) Mutu
- 3) Efisiensi
- 4) Fleksibilitas dan kepuasan
- 5) Pengembangan
- 6) Kriteria jangka menengah-persaingan
- 7) Kriteria jangka panjang-kelangsungan hidup

Kriteria efektifitas suatu program dikatakan efektif atau tidak dapat dilihat pada ukuran pencapaian tujuan. S.P. Siagian dalam Daniel Setiawan, dkk (2022:19-20) mengemukakan pendapatnya mengenai kriteria efektifitas, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan terhadap apa yang akan dicapai
Kejelasan tujuan ini dimaksudkan supaya tenaga manusia yang digunakan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
Kejelasan strategi pencapaian tujuan melihat "pada jalan" yang diikuti para pelaksana agar tidak tersesat sebagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
Proses yang dimaksud ini berkorelasi dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang
Pada hakekatnya berarti memutuskan saat ini apa yang dikerjakan organisasi di masa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat
Penyusunan program yang tepat sesuai rencana harus dijabarkan dengan cermat pelaksanaannya sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
Indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
Pelaksanaan program akan mencapai atau tidaknya efektif dan efisien, harus dibarengi dengan pencapaian sasarnya terukur.

- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian
Sistem pengawasan dan pengendalian harus memiliki sifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna.

d. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas. Untuk memahami konsep efektivitas lebih detail dan terarah, para ilmuwan mengemukakan berbagai macam bentuk pendekatan dalam efektivitas.

Pendekatan efektivitas suatu program menurut Dedi Amrizal, dkk (2018:44-46) menjelaskan beberapa pendekatan yang digunakan dalam efektivitas yaitu:

1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena

lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Martani dan Lubis dalam Daniel Setiawan, dkk (2022:21) memberikan pandangannya yaitu ada tiga pendekatan kriteria yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi, yakni:

1) Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan sumber dengan mengukur efektivitas dari *input*. Fokus pendekatan sumber adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Pendekatan proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses menekankan pada melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal organisasi.

3) Pendekatan sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan sasaran (*goals approach*) memusatkan perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi mencapai hasil (*output*) sesuai dengan rencana.

Ali Muhidin dalam Daniel Setiawan, dkk (2022:22-24) menjelaskan beberapa pendekatan efektivitas sebagai bahan evaluasi yaitu:

1) Pendekatan eksperimental (*Experimental Approach*)

Pendekatan eksperimen ini berasal dari kontrol eksperimen yang umumnya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya secara umum memperoleh kesimpulan tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.

2) Pendekatan berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*)

Pendekatan dengan orientasi pada tujuan memakai tujuan program itu sendiri sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini dipandang sangat wajar dan praktis dalam sebuah desain pengembangan program. Pendekatan dengan orientasi pada tujuan (*goal oriented approach*) memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

3) Pendekatan berfokus pada keputusan (*The Decision Focused Approach*)

Pendekatan berfokus pada keputusan memberi penekanan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Pandangan ini melihat pentingnya informasi dalam membantu para pengelola program. Hasil dari evaluasi ini mensyaratkan kekuatan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

4) Pendekatan berorientasi pada pemakai (*The User Oriented Approach*)

Pendekatan berorientasi pada pemakai memfokuskan pada masalah penggunaan evaluasi dan memberi penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utama pendekatan berorientasi pada pemakai terletak pada pemakaian informasi secara potensial. Sejumlah elemen cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi sudah sejak dini disadari oleh para evaluator, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi di mana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan berorientasi pada pemakai, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi penting artinya, namun tidak sepenting cara pemakaian informasi.

5) Pendekatan responsif (*The Responsive Approach*)

Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi memberi penekanan pada mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator umumnya akan menghindari hanya satu jawaban yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik dalam mengevaluasi program. Evaluator mencari cara untuk menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan pandangan orang-orang dalam melukiskan atau menguraikan kenyataan. Jadi, dapat dipahami tujuan evaluasi

adalah memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

2. Identitas Kependudukan Digital

a. Pengertian Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Menurut Pasal 1 ayat 18 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Dengan definisi ini, Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dipahami sebagai wujud digital dari KTP elektronik (KTP-el) beserta dokumen kependudukan lainnya (misalnya kartu keluarga, biodata, akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan) yang dapat diakses secara resmi melalui aplikasi di telepon pintar (*smartphone*).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota sebagai satu kesatuan.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya sekadar pengganti KTP-el fisik, tetapi juga menjadi platform digital identitas

penduduk yang terintegrasi dengan sistem SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

b. Manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki sejumlah manfaat penting, di antaranya:

1) Mengikuti perkembangan teknologi informasi

Identitas Kependudukan Digital (IKD) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan digitalisasi kependudukan di era transformasi digital. Dengan adanya IKD, layanan kependudukan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global dan mendukung penerapan *e-government* di Indonesia.

2) Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan

Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan secara lebih mudah. Misalnya, data keluarga, biodata, dan akta lahir dapat dilihat dalam satu aplikasi, sehingga meminimalisir kebutuhan membawa banyak dokumen fisik.

3) Mempermudah dan mempercepat pelayanan publik maupun privat

Identitas Kependudukan Digital (IKD) memungkinkan integrasi dengan berbagai layanan, baik pemerintah maupun swasta, seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain. Hal ini mempercepat proses verifikasi identitas tanpa harus menunggu pengecekan manual dokumen fisik.

4) Meningkatkan keamanan data penduduk

Identitas Kependudukan Digital (IKD) menggunakan sistem autentikasi berlapis berupa biometrik, kode verifikasi, dan *QR Code* terenkripsi. Dengan demikian, kemungkinan pemalsuan identitas atau kebocoran data dapat diminimalisir.

c. Fungsi utama Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) berfungsi dalam tiga aspek penting:

- 1) Pembuktian Identitas, memastikan identitas seseorang secara sah.
- 2) Autentikasi Identitas, melalui verifikasi biometrik, swafoto, sidik jari, atau iris mata.
- 3) Otorisasi Identitas, memberi kendali kepada pemilik Identitas Kependudukan Digital (IKD) atas data pribadinya agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

d. Urgensi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

- 1) Modernisasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022 menggantikan aturan lama (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 38 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 6 Tahun 2011) yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan era digital. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbarui sistem kependudukan agar sejalan dengan perkembangan zaman.

2) Efisiensi dan Aksesibilitas

Dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), penduduk tidak lagi perlu membawa KTP-el fisik ke mana-mana. Identitas resmi dapat ditunjukkan langsung melalui aplikasi di gawai pintar. Hal ini sangat bermanfaat terutama dalam situasi darurat, perjalanan, maupun transaksi digital.

3) Perlindungan Data Pribadi

Urgensi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga terletak pada aspek keamanan informasi. Peraturan Menteri Luar Negeri ini menegaskan bahwa sistem keamanan IKD mengacu pada standar internasional seperti ISO/IEC dan NIST. Selain itu, tersedia mekanisme pemblokiran akun jika perangkat hilang serta menu lepas perangkat saat pengguna mengganti ponsel.

4) Dukungan Transformasi Layanan Publik dan Swasta

Identitas Kependudukan Digital (IKD) mendukung integrasi layanan lintas sektor. Misalnya:

- a) Layanan publik berupa pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, transportasi.
- b) Layanan privat berupa pembukaan rekening bank, klaim asuransi, hingga transaksi digital. Integrasi ini mempercepat pelayanan dan menekan biaya administrasi.

5) Kesiapan Menghadapi Revolusi Digital Nasional

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari strategi besar Transformasi Digital Nasional yang

dicanangkan pemerintah. Dengan adanya IKD, Indonesia semakin siap menuju masyarakat digital yang modern, inklusif, dan efisien dalam layanan publik.

6) Efisiensi Anggaran Negara

Dalam jangka panjang, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengurangi ketergantungan pada blangko KTP-el fisik yang memerlukan biaya cetak, distribusi, dan pemeliharaan.

e. Persyaratan dan Tahapan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

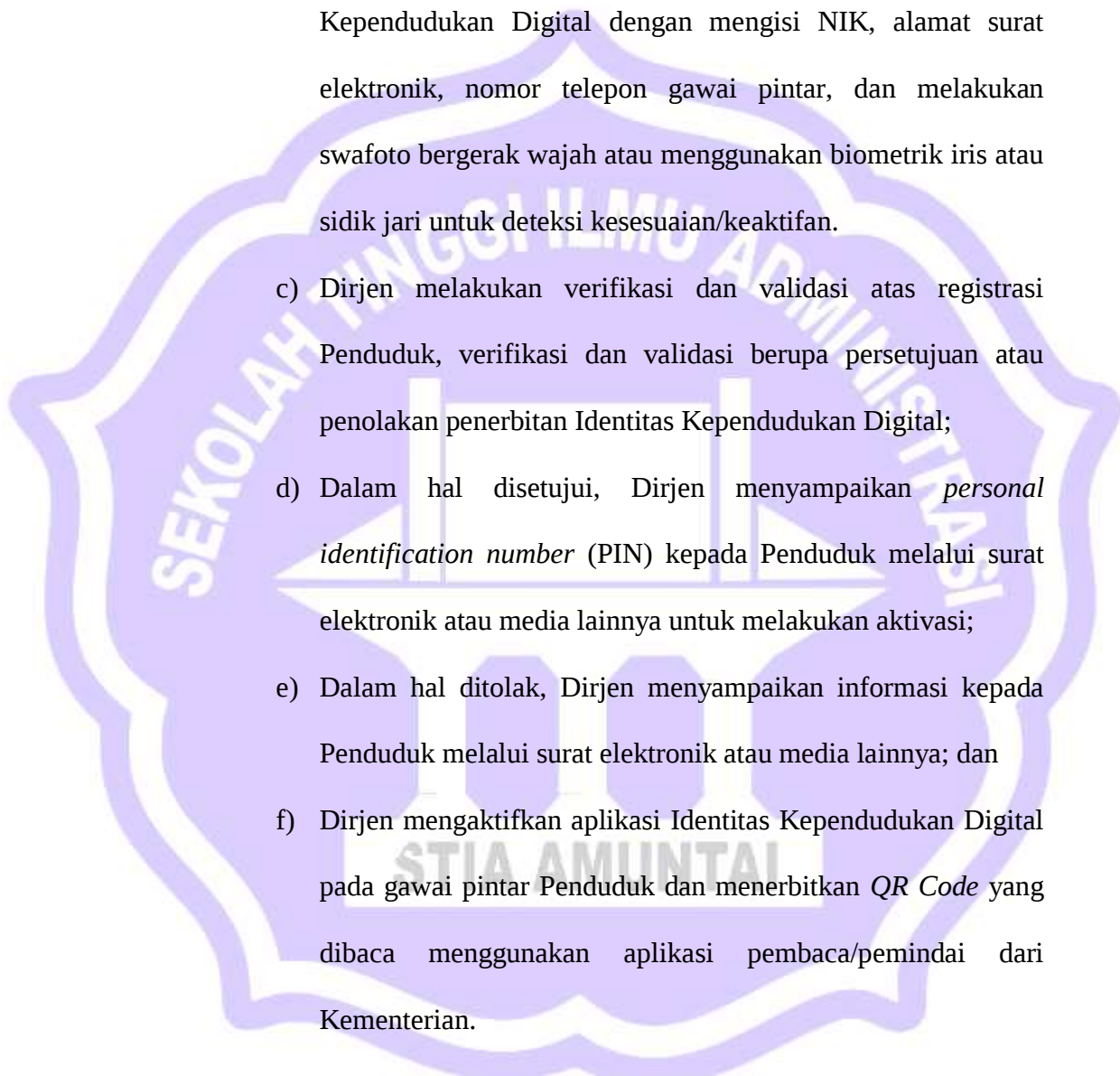
1) Syarat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki beberapa persyaratan dalam penerbitan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, di antaranya:

- a) Memiliki KTP-el fisik atau sudah melakukan perekaman biometrik.
- b) Memiliki gawai pintar atau *smartphone*.
- c) Pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kesiapan SIAK Terpusat.

2) Tahapan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki tahapan dalam aktivasinya, yaitu :

- 
- a) Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan teridentifikasi tunggal mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui gawai pintar;
 - b) Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan mengisi NIK, alamat surat elektronik, nomor telepon gawai pintar, dan melakukan swafoto bergerak wajah atau menggunakan biometrik iris atau sidik jari untuk deteksi kesesuaian/keaktifan.
 - c) Dirjen melakukan verifikasi dan validasi atas registrasi Penduduk, verifikasi dan validasi berupa persetujuan atau penolakan penerbitan Identitas Kependudukan Digital;
 - d) Dalam hal disetujui, Dirjen menyampaikan *personal identification number* (PIN) kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya untuk melakukan aktivasi;
 - e) Dalam hal ditolak, Dirjen menyampaikan informasi kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya; dan
 - f) Dirjen mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada gawai pintar Penduduk dan menerbitkan *QR Code* yang dibaca menggunakan aplikasi pembaca/pemindai dari Kementerian.

C. Kerangka Pemikiran

Efektivitas adalah sejauh mana perencanaan, proses, dan hasil yang dicapai dapat memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas pada dasarnya merupakan salah satu kriteria penting

dalam ilmu administrasi yang menekankan pada ketepatan antara harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Efektivitas tidak hanya diukur dari minimnya kesalahan, tetapi juga dari kemampuan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, memanfaatkan pengalaman masa lalu, serta mengimplementasikan pemikiran rasional ke dalam tindakan nyata. Dengan demikian, efektivitas menjadi landasan utama bagi individu, kelompok, maupun organisasi dalam mencapai tujuan secara optimal, serta selalu berkaitan erat dengan rasionalitas dan efisiensi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu agenda penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Transformasi pelayanan publik menuju era digital memiliki relevansi yang krusial dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah bentuk modernisasi administrasi kependudukan yang merepresentasikan KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya dalam bentuk digital melalui aplikasi pada gawai pintar. IKD bertujuan mempermudah akses layanan publik, meningkatkan keamanan data penduduk dengan sistem autentikasi berlapis, serta mendukung integrasi layanan lintas sektor. Urgensi IKD terletak pada perannya dalam memperkuat transformasi digital nasional, meningkatkan efisiensi pelayanan, melindungi data pribadi, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Dengan adanya IKD, pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

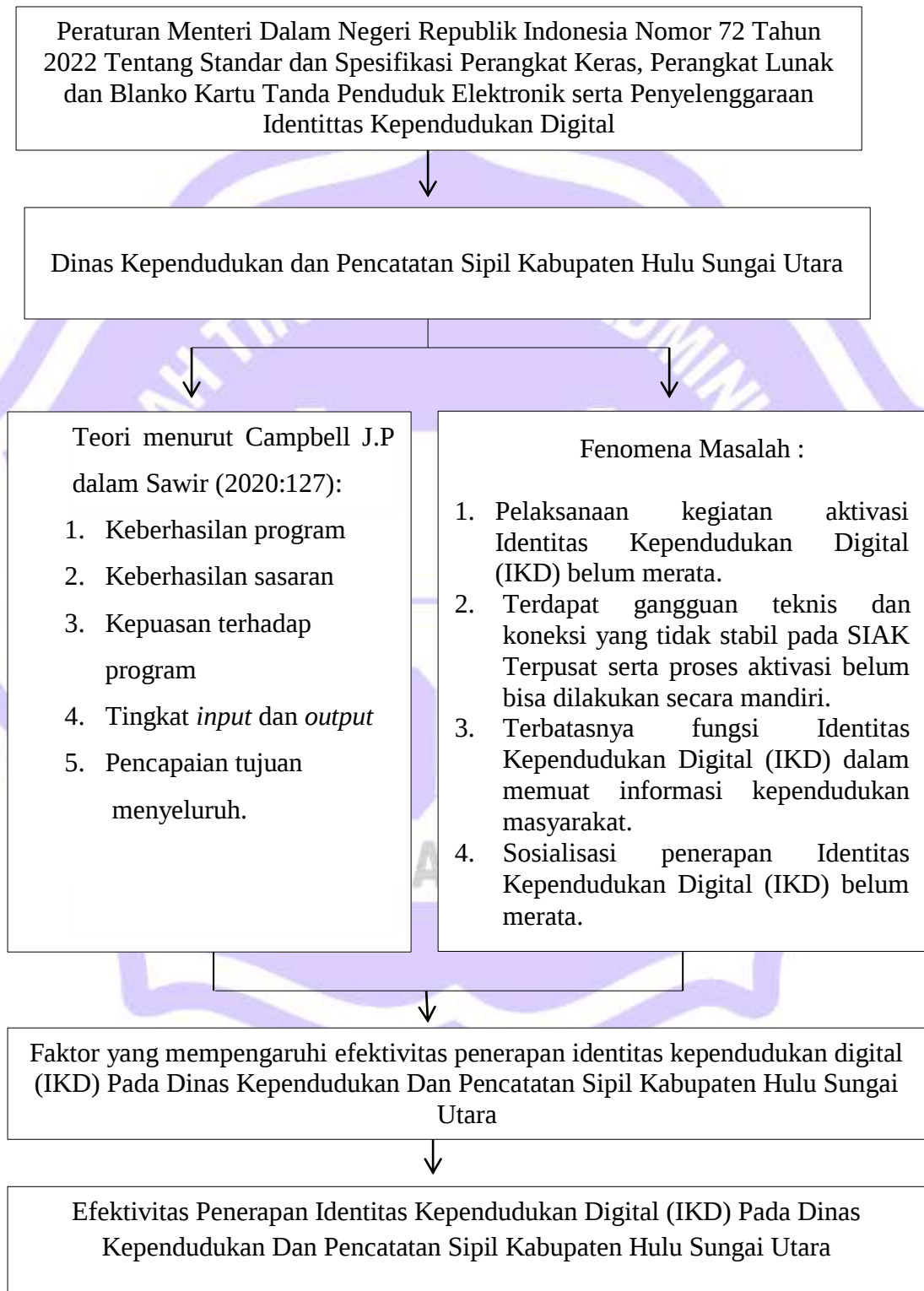
Untuk lebih memperjelas permasalahan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas, penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sesuai dengan teori Penelitian dengan teori Campbell J.P dalam Sawir (2020:127). Teori ini mencakup beberapa indikator terkait efektivitas yaitu:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*
5. Pencapaian tujuan menyeluruh



Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak di Jalan Karya Manuntung, Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71419.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Sahir (2021:6), Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.

Menurut Flick dalam Imam Gunawan (2014:81) “Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya.”

Menurut Creswell dalam Leo Agustino (2022:211), “Penelitian kualitatif merupakan metode atau teknik mengeksplorasi dan memahami

makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial.”

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus untuk menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara cermat, penyusunan deskripsi yang rinci sesuai konteks, wawancara mendalam, serta telaah dokumen seperti buku penimbangan dan sumber terkait lainnya.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Menurut Kim, Sefcik, dan Bradway dalam Fauzi, dkk (2022 :24-25), “Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang penting dan sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada pertanyaan *siapa, apa* dan *di mana* peristiwa atau pengalaman terjadi dan mendapatkan data langsung dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami. Hasil dari deskriptif kualitatif adalah informasi empiris yang factual.”

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Menurut Wahidmurni (2017:8), dikatakan data primer, jika data tersebut diperoleh dari sumber asli/sumber pertama.

Data primer adalah data yang dihimpun peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Artinya, data ini diperoleh melalui interaksi

langsung di lapangan, misalnya lewat wawancara dengan informan yang dianggap kompeten. Oleh karena itu, data primer sering disebut sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat terkini (*up to date*).

b. Data Sekunder

Menurut Wahidmurni (2017:8), dikatakan data sekunder jika data tersebut diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan berfungsi melengkapi atau mendukung data primer. Jenis data ini biasanya bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, maupun dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari literatur maupun sumber informasi di internet, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Menurut Wahidmurni (2017:8), sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menentukan jenis data yang diperoleh, apakah termasuk data primer atau data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari para informan. Informan adalah individu yang dijadikan narasumber untuk memberikan

keterangan mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan latar penelitian. Mereka dipilih karena dianggap memahami secara mendalam permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sumber data utama yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Menurut Sugiyono (2023:289), “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Donny Firdaus Sofyan, S.Sos, M.AP	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 orang
2	Yayuk Sri Suwartiningsih, SE	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan	1 orang
3	Agus Darmawandi, ST, CPOf	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	1 orang
4	Sri Rahma Agustina, S. Kom	Administrator Database Kependudukan	1 orang
5	Muhammad Fazeriansyah, S.Kom	Operator IKD/ Pranata Komputer Ahli Muda	1 orang

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Muhammad Nufi Aminuddin, S.Sos	Operator IKD/Penata Layanan Operasional	1 orang
7	Muhammad Husaini, S.Sos	Operator IKD/Penata Layanan Operasional	1 orang
8	Muhammad Jayen Suseno	Kepala Desa	1 orang
9	Rakhmat Triani Wijaya	KASI Pemerintahan Desa	1 orang
10	Ahmad Zakki Syarif	Sekretaris Desa	1 orang
11	Sheri Ananda	Masyarakat Umum	1 orang
12	Asmi Ningsih	Masyarakat Umum	1 orang
13	Siti Khadijah	Masyarakat Umum	1 orang
14	Nisa	Masyarakat Umum	1 orang
15	Fitriyawati	Anggota BPD/Masyarakat Umum	1 orang
Jumlah Informan			15 orang

(Sumber : Data dibuat oleh penulis, 2025)

D. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian merupakan sarana yang dipakai peneliti untuk mempermudah proses pengumpulan data, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat, lengkap, dan tersusun secara sistematis.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sesuai dengan teori Campbell J.P dalam Sawir (2020:127).

Teori ini mencakup beberapa indikator terkait efektivitas yaitu:

1. Keberhasilan Program

Dilihat dari pengetahuan terhadap program dan penerapan program yang dilakukan sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran program harus mempertimbangkan target yang diharapkan dari suatu program serta mekanisme atau tahapan pengoperasian program.

3. Kepuasan Terhadap Program

Semakin berkualitas suatu program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima program semakin tinggi, dan dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal pemerintah.

4. Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengelolaan program serta bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dilihat dari sejauh mana bentuk transparansi yang dilakukan dalam penerapan program serta penilaian tentang program tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai desain operasional penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3. 2
Desain Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas Program Teori menurut Campbell J.P dalam Sawir (2020:127)	Keberhasilan program	a. Pengetahuan Program b. Penerapan Program
	Keberhasilan sasaran	a. Sasaran program b. Mekanisme mempertahankan sasaran
	Kepuasan terhadap program	a. Kepuasan pelaksanaan b. kualitas aplikasi
	Tingkat <i>output</i> dan <i>input</i>	a. Tingkat <i>output</i> b. Tingkat <i>input</i>
	Pencapaian tujuan menyeluruh	a. Transparansi b. Penilaian program

(Sumber : Data dibuat oleh Penulis, 2025)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Dengan demikian, dalam penyusunan karya ilmiah, peneliti perlu memilih teknik pengumpulan data yang relevan dan paling sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Menurut Sugiyono (2023:296), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.”

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Secara sederhana observasi diartikan sebagai cara melihat, memperhatikan, dan mencatat sesuatu yang ada di sekitar.

Menurut Riyanto dalam Hardani, dkk (2020:125) “Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebelumnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksananannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.”

2. Wawancara

Secara umum, wawancara merupakan komunikasi atau percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan untuk mendapatkan informasi.

Menurut Nazir dalam Hardani, dkk (2020:138), “Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).”

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk gambar, kutipan, buku dan bahan referensi lain yang dapat mendukung penelitian.

Menurut Hardani, dkk (2020:149) “Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.”

F. Teknik Analisa Data

Menurut Bongdan dalam Hardani, dkk (2020:161) “*Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.* Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Teknik analisis data digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu efektivitas penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Hardani, dkk (2020:163 189) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

G. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2023:365-371) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan waktu.

4. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif

berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

5. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6. Mengadakan *member check*

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/ dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Angrayni dan Yusliati. 2018. *Eefektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Amrizal D, Dalimunthe dan Yusriati. 2018. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Ilmiah Aqli.
- Fauzi, Ahmad. *et al.* 2022. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Cv. Pena Persada.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardani, *et al.* 2020. *Metode Penelitian Kualitati dan Kuantitatif*. Mataram: Pustaka Ilmu.
- Hertati, Diana. 2019. *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya*. Surabaya: CV. Mitra Sumber Rejeki.
- Hidayat, Alam, *et al.* 2024. *Kajian Efektivitas Layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik* . Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Mudiana, Raka dan Mardika. 2024. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS)*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.

Mutiarin dan Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Manajemen Birokrasi dan Kebijakan.

Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia.

Sawir, Muhammad. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Setiawan D, Madhakomala dan Cahyana. 2022. *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.

Siahaan dan Pardede. 2022. *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama.

Siregar dan Lubis. 2023. *Efektivitas Program Dana Desa Menuju Desa Maju*. Bogor: PT. Jawa Mediasindo Lestari.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.

Zohriah, Anis. 2023. *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Kepustakaan*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.

Apriani, A. R. 2022. *Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi pada Universitas Hasanuddin Makassar.

Nur, I. A. 2023. *Efektivitas pembuatan Kartu Tanda Penduduk berbasis aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar*. Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Adnan, A. F. 2021. Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui Sistem Paduko. *JESS (Journal Of Education On Social Sciene)*, 71-74.

Wahidmurni. 2017. Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. *Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 8.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2025. *Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester I Tahun 2025*. Disdukcapil HSU.

